

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Permendagri, 2018). Keuangan desa bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan pada masyarakat desa yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa yaitu kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa untuk dapat membantu pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan merupakan isu terpenting untuk dibahas mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Kualitas adalah suatu hal yang dapat menentukan tingkat kinerja pada tenaga kerja yang ada. Dan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan organisasi kepada public atas keberhasilan atau kegagalannya dalam melaksanakan misi atau tujuan yang hendak dicapai.

Banyaknya kasus mengenai baik-buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan perbincangan yang sangat hangat untuk dikupas tuntas. Permasalahan ini terbukti sejak diberlakukannya akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 yang menyebabkan banyaknya instansi yang mendapatkan opini dari BPK yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini diakibatkan karena para pegawainya masih banyak yang

belum memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga kualitas penyusunan laporan keuangannya masih terbilang rendah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi baik-buruknya kualitas laporan keuangan pemerintahan yaitu pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi. Laporan keuangan ini biasanya didapat dari sistem pengolahan informasi akuntansi keuangan yang akan disajikan kepada pihak luar Instansi/Lembaga dalam bentuk laporan keuangan berupa neraca, laporan labar-rugi, laporan laba yang ditahan dan laporan perubahan posisi keuangan, serta *cash flow* (Dison, 2019, h.77).

Dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang wajar dan akurat, maka disusunlah berdasarkan pedoman SAP yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya supaya dalam proses penyusunan dan penyajiannya tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman SAP berdampak tinggi untuk meningkatkan kualitas penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah (Sukmawati, 2019, h.164).

Untuk dapat menjalankan SAP dengan baik maka sumber daya manusianya perlu memanfaatkan teknologi informasi yang memadai terkait dengan keilmuan akuntansi yang dibutuhkan. Pemanfaatan teknologi ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan dan mempermudah jalannya para pegawai yang ditugaskan untuk mengolah data, menyimpan dan menyebarluaskan informasinya.

Dalam peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 juga dinyatakan bahwa karakteristik dari kualitas laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual yaitu informasi akuntansi yang diberikan harus relevan, andal dan dapat dipahami serta dibandingkan. Informasi keuangan disusun sebagai upaya untuk membandingkan realisasi pendapatan, pembiayaan dengan anggaran

yang telah disesuaikan, transfer, belanja, dan digunakan untuk menilai kondisi keuangan dari suatu perusahaan atau instansi/Lembaga serta sebagai alat evaluasi atas efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu hal yang memiliki peran penting dalam berjalan baiknya kegiatan memproses laporan keuangan pada peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan dituliskan bahwa pemerintah mempunyai tugas dalam mengembangkan dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi di masa serba digitalisasi ini agar mengalami peningkatan pada saat mengolah data keuangan, menyimpan dan menyebarkan informasi keuangan kepada orang-orang yang berhak.

Laporan keuangan pemerintah desa kecamatan Bintang Bayu kabupaten Serdang Bedagai dikelola melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini merupakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan dasar untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. BPK adalah salah satu auditor pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI dalam bidang pengawasan keuangan yang dilaksanakan pemerintah (Ikhsan, 2018, h.16).

Adanya kelemahan pada kualitas penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat melalui capaian opini dari hasil pemeriksaan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki 4 opini dalam pengauditannya yaitu pertama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau *Unqualified Opinion*), kedua Wajar Dengan Pengecualian (WDP atau *Qualified Opinion*), ketiga Opini menyatakan Tidak Wajar (TW atau *Adverse Opinion*), dan terakhir pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (TMP atau *Disclaimer Opinion*). Dan sejak diberlakukannya akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan opini pada tahun 2017-2022 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

**Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK Pada Serdang Bedagai
Tahun 2017-2022**

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Opini					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Serdang Bedagai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari tabel di atas, menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten Serdang Bedagai mengalami naik-turunnya opini dari BPK perwakilan Sumut. Di mana pada tahun 2017 mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan pendapat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikemukakan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil opini dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyusunan laporan keuangan yang terjadi pada pemerintah desa kabupaten Serdang Bedagai.

Menurut penelitian Heru Mulyadi Santoso (Heru dkk, 2020, h.330) menemukan hasil risetnya bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dinyatakan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitiannya menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman SAP, kompetensi SDM yang ada dan pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki suatu pemerintah daerah maka semakin baik pula kualitas laporannya.

Dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Wiwidasari, 2020, h.70) bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan, latar belakang Pendidikan dan pelatihan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa kecamatan Silangkitang kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun, variabel latar belakang Pendidikan tidak berpengaruh, sedangkan untuk variabel pemahaman SAP dan pelatihan dikatakan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada penelitian sebelumnya (Zubaidi dkk, 2019, h.73) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa dari hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh kompetensi SDM dan pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan menyatakan hubungan yang positif signifikan.

Temuan dari hasil riset (Puspita dkk, 2020, h.86) menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap variabel Y yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Seluma. Di mana semakin berkualitas SDM-nya, semakin baik memanfaatkan penggunaan teknologi informasinya dalam proses pengelolaan data, dan semakin paham pula mengelola laporan keuangannya sesuai SAP serta semakin bagus sistem pengendalian intern yang dilakukan maka akan memperoleh hasil laporan keuangan yang sangat berkualitas.

Dalam hasil penelitian terdahulu (Wulan dkk, 2020, h.16) disimpulkan bahwa latar belakang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi dan pemahaman akuntansi berpengaruh atas kualitas laporan keuangan yang telah disusun. Namun, secara simultan variabel X (latar belakang Pendidikan, pemanfaatan teknologi dan pemahaman akuntansi) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Muara Bungo.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dituliskan di atas, penulis berhasil menganalisis bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah memberikan hasil yang tidak sama dari satu peneliti ke peneliti lain. Atas dasar tersebut maka penelitian ini hanya akan menguji beberapa hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu antara lain pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan mengeluarkan angka 0,74 atau 74% atau hasil pengujian determinasi R Square. Artinya menandakan variabel pemahaman SAP dan pemanfaatan TI 74% mempengaruhi kualitasnya dan sisa 26% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel yang diuji oleh peneliti. Pemahaman SAP dikatakan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan dikarenakan pada saat proses penyajian dan penyusunan laporan keuangan penelitian daerah harus dibantu oleh pedoman yang tepat yaitu salah satunya pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang memadai. Dan faktor kedua yang menjadi pengaruh kualitasnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi, hal ini disebabkan semakin pesatnya perkembangan teknologi di era digitalisasi yang pastinya membawa pengaruh besar terhadap kehidupan dunia, maka mesti dimanfaatkan sebijak mungkin agar tidak ketinggalan informasi di zamannya. Dan di sini pemerintah mengambil langkah untuk menerapkannya agar dapat mempermudah proses penyampaian informasi dan komunikasi dengan efisien, efektif dan akurat serta memiliki sifat rahasia dan keamanan data yang cukup terjamin, juga tidak terlalu banyak membuat biaya pada saat proses transaksi sehingga dapat membuat laporan keuangan yang sesuai karakteristik kualitasnya (Dani, 2023, h.142).

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan pada peraturan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju basis akrual menyebabkan pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Masih minimnya alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan khususnya pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Lokasi penempatan pegawai yang berlatar belakang Pendidikan akuntansi belum merata pada setiap kantor desa kecamatan Bintang Bayu kabupaten Serdang Bedagai.
3. Mengalami keterbatasan pada kemampuan SDM saat memahami penyusunan dan pengelolaan berbagai anggaran laporan keuangan meskipun sudah mengikuti pelatihan.

C. Batasan Masalah

Diterapkannya batasan masalah pada penelitian ini ialah agar dapat lebih terarah. Melihat identifikasi permasalahan di atas dan menyesuaikan dengan beberapa faktor antara lain faktor biaya, dan keterbatasan waktu penelitian serta kemampuan yang dimiliki peneliti. Maka peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan kecamatan Bintang Bayu kabupaten Serdang Bedagai.

D. Rumusan Masalah

Berikut beberapa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa kecamatan Bintang Bayu kabupaten Serdang Bedagai?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa kecamatan Bintang Bayu kabupaten Serdang Bedagai?

3. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa kecamatan Bintang Bayu kabupaten Serdang Bedagai?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa kecamatan Bintang Bayu kabupaten Serdang Bedagai
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa kecamatan Bintang Bayu kabupaten Serdang Bedagai
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa kecamatan Bintang Bayu kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga berguna bagi beberapa pihak berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan, dapat mampu dan menguasai perihal pengaruh pemahaman SAP dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Dengan penelitian ini diharapkan, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak pemerintah desa agar dapat menyajikan dan menyusun laporan keuangan sesuai peraturan SAP, serta dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam membuat laporan keuangan melalui pemahaman SAP dan pemanfaatan teknologi informasi yang telah diberlakukan.

3. Bagi Akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan, dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan.

